



Menegakkan HAM dan Nilai Pancasila di Era Gen-Z

Ikhsan

ikhsansan757@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Herlina

herlina170772@gmail.com

Dosen PGMI

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dwi Yana Sepvina Barus

yanad8748@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Juleha

julehabts07@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Panam, Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Korespondensi penulis: *ikhsansan757@gmail.com*

Abstrak *Therefore, this is the role of Generation Z to help enforce human rights. For those who are still unfamiliar with the term Gen-Z, Gen-Z is a generational shift from Generation Y, which at that time technology was developing, then now it has shifted to Generation Z or can also be called i-generation, where this generation is up to date on issues that are developing and spread on the internet or social media. This is where the importance of the role of Gen-Z in helping to enforce human rights lies, this can be done by creating a forum or community of human rights enforcers in which ideas can be exchanged and critical thinking can be practiced, observing the surroundings for cases of bullying and helping and protecting victims so that they are willing to speak up about the cases that befell them without being burdened. besides that because Gen-Z is a very tech-savvy generation, we can take advantage of this technology very well, such as making short, interesting and interactive videos so that the content of the video discussing human rights enforcement is easier to accept and understand, creating threads about the importance of knowing human rights, characteristics of human rights violations, types of human rights violations and so on which in the presentation of this thread can be linked to current issues so that they are interesting for the public to read, counseling or seminars/webinars about human rights can also be options to echo human rights enforcement. Let's not ignore this bullying problem. Because if it is not followed up from now on, the problem will get bigger and harder to control. We must immediately protect the victims, guide them, and provide support for them. Because often the victims do not dare to speak up, and only keep it to themselves, it is not uncommon for it to take a life.*

Keywords: *Gen-Z, Human Rights, Pancasila values.*

Abstrak. Maka dari itu disinilah peran dari Generasi Z untuk ikut membantu penegakan HAM. Bagi yang masih asing dengan istilah Gen-Z, Gen-Z merupakan pengalihan generasi dari Generasi Y yang pada masa itu teknologi sedang berkembang kemudian saat ini sudah beralih ke generasi Z atau bisa disebut juga i-generation dimana generasi ini generasi yang up to date terhadap isu-isu yang berkembang dan tersebar di internet atau media sosial. Disinilah pentingnya peran para Gen-Z dalam membantu menegakkan HAM, hal ini dapat dilakukan dengan membuat sebuah forum atau komunitas penegak HAM yang didalamnya dapat dilakukan pertukaran pikiran dan berlatih berpikir kritis, mengamati sekitar apakah ada kasus

pembullying dan membantu serta melindungi korban agar mau speak-up tentang kasus yang menyimpannya tanpa terbebani. selain itu karena Gen-Z merupakan generasi yang sangat melek teknologi sehingga kita dapat memanfaatkan adanya teknologi ini dengan sangat-sangat baik seperti membuat video singkat yang menarik dan interaktif sehingga isi dari video yang membahas tentang penegakan HAM agar lebih mudah diterima dan dipahami, membuat utas atau thread tentang pentingnya mengetahui HAM, ciri-ciri pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM dan lain sebagainya yang dalam penyajian utas ini dapat dikaitkan dengan isu yang sedang ramai sehingga menarik untuk dibaca masyarakat, penyuluhan ataupun seminar/webinar tentang HAM juga dapat menjadi opsi untuk menggaungkan penegakan HAM. Jangan sampai kita mengabaikan masalah pembullying ini. Karena jika tak di tindak lanjuti dari sekarang, masalahnya akan semakin besar dan sulit untuk di kendalikan. Para korbannya pun harus segera kita lindungi, membimbing, dan memberikan support bagi mereka. Karena seringkali para korban tak berani untuk bicara, dan hanya memendamnya sendirian, tak jarang juga dapat menghilangkan sebuah nyawa.

Kata Kunci: Gen-Z, HAM, Nilai Pancasila.

PENDAHULUAN

Setiap orang yng dilahirkan ke dunia ini secara otomatis di karuniai seperangkat hak hak yang merupakan anugerah Tuhan. Ini adalah hak dasar dan utama yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan sangat penting bagi keberadaan manusia. Akibatnya, hak asasi manusia bukan lagi hak yang baru; sebaliknya, mereka sudah ada sejak manusia itu dikodratkan hadir di dunia ini (Ceswara & Wiyatno, 2018).

Hak Asasi Manusia atau dikenal sebagai hak kemanusiaan (human right) (Putra, 2022), adalah hak mendasar yang dimiliki setiap orang sebagai anggota umat manusia. Hak tersebut dimiliki karena ia adalah manusia, dan masing-masing manusia berhak atas hak tersebut tanpa kecuali. Tidak ada hak yang diberikan atau disematkan karena pada hakikatnya, hak seseorang atas hak asasi manusia hanya bersumber dari martabat yang melekat pada dirinya.

Terbentuknya sistem politik demokratis menandai dimulainya sejarah awal perkembangan hak asasi manusia. Sebagai negara yng menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia telah berusaha semaksimal mungkin mengatur hak asasi manusia guna mewujudkan lingkungan hidup yang layak dan tertib. Ketiadaan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia akan semakin mempersulit suatu bangsa untuk mencapai kesejahteraan, perdamaian, kebersamaan, dan persatuan. Oleh karena itu, wajib bagi suatu negara untuk membuat peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan nasional Indonesia. Nilai-nilai paling penting yang menentukan bagaimana suatu negara, bangsa, atau masyarakat harus berperilaku terdapat dalam lima sila Pancasila. Selain mewakili cita cita yang ingin dicapai bangsa Indonesia di masa depan, Pancasila merupakan ideologi yang berasal dari semangat masyarakat Indonesia sejak menata kehidupan kolektif diseluruh Indonesia. (Sepranadja, 2019)

Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mencakup penerapan nilai-nilai Pancasila sekarang terutama pada Gen Z untuk menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sebab,

penegakan HAM yang sesuai dengan jati diri bangsa sangat erat dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini berusaha membantu menyadarkan pada orang-orang di luaran sana betapa pentingnya pembelajaran HAM, karena ini juga menyangkut dengan nilai dari Pancasila.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data menggunakan metode library research, yaitu studi kepustakaan. Penelitian yang sumber data empirik yang primer maupun sekunder berasal dari buku, dokumen, jurnal, artikel atau literatur-literatur yang lain. Penelitian ini juga menggunakan metode Analisis Konten yaitu mengkaji konten yang dihasilkan oleh Gen Z di media sosial, blog, atau platform lainnya mengenai HAM dan Nilai Pancasila. Tujuannya adalah mengidentifikasi tema, narasi, dan cara Gen Z menyampaikan pandangan mereka tentang isu-isu ini. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menganalisis dengan fokus pada pesan yang disampaikan dan konteksnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia ialah hak dasar yang dimiliki manusia sejak dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia. Tanpa hak-hak ini, akan sulit bagi kita untuk hidup sebagai manusia. Manusia mempunyai hak ini hanya berdasarkan kemanusiaannya; itu tidak diberikan oleh negara atau masyarakat. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak bergantung pada penerimaan orang lain, sekelompok orang, atau negara. Manusia dianugerahi hak oleh Penciptanya, dan hak tersebut tidak dapat dicabut. Ia adalah makhluk Tuhan yang sangat bermartabat, bahkan sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang nyata dan melekat pada diri setiap orang. (Ceswara & Wiyatno, 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian tentang hak asasi manusia yang berbunyi: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Oleh karena itu, hal ini bersifat universal, artinya, hal ini berlaku bagi semua orang dan di mana saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Manusia memerlukan hak ini untuk membela diri dan martabat kemanusiaannya; itu berfungsi sebagai dasar moral untuk berinteraksi dan berhubungan dengan sesama manusia. Namun hal ini tidak berarti bahwa hak asasi manusia dapat dipenuhi sepenuhnya karena hal tersebut dapat melanggar hak orang lain. Ketika seseorang

memperjuangkan haknya dengan mengesampingkan hak orang lain, itu adalah tindakan yang menyimpang HAM. Maka dari itu kita harus tetap mengetahui hak-hak kita yang pada dasarnya saling terkait dengan hak asasi manusia lainnya.

Kita mempunyai tanggung jawab untuk mempertimbangkan, menghormati, dan menghargai hak asasi manusia orang lain saat kita menjalankan hak asasi kita sendiri. Sejak manusia lahir di dunia, kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, dan martabat manusia telah ada. Negara Republik Indonesia mengakui dan membela hak asasi manusia sebagai hak yang melekat dan bagian tak terpisahkan dari kemanusiaan, dan untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, kecerdasan, serta harkat dan martabat manusia, harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Beberapa instrumen hak asasi manusia yang dimiliki oleh Republik Indonesia antara lain:

- 1) Pancasila
- 2) Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia di Indonesia secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut:

1. *Persona l Rights*: Kebebasan individu, seperti kemampuan untuk bergerak dengan bebas, menganut agama, dan menyatakan pendapat.
2. *Property Rights*: Hak-hak ekonomi mendasar, yang sering disebut hak milik, terdiri dari kebebasan untuk memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan properti.
3. *Political Rights*: Hak politik, yang mencakup kebebasan untuk membentuk partai politik, ikut serta dalam politik, dan untuk dipilih serta memberikan suara.
4. *Rights of legal equality*: Hak atas persamaan di depan hukum dan pemerintahan
5. *Social and Culture Rights*: Hak atas budaya dan masyarakat. Misalnya kebebasan memilih jalur pendidikan dan kebebasan mengembangkan budaya.
6. *Procedural Rights*: Hak mendapatkan perlakuan tatacara peradilan dan perlindungan contohnya yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan peradilan.

Implementasi hak asasi manusia di masyarakat memerlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat itu sendiri, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penghormatan terhadap martabat manusia. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidaksetaraan, korupsi, dan kurangnya kesadaran masyarakat sering kali menghambat realisasi penuh hak-hak ini.

Oleh karena itu, pendidikan dan advokasi berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan diterapkan secara efektif, sehingga setiap individu dapat menikmati kehidupan yang bebas, adil, dan bermartabat.

B. Pelaksanaan Nilai-nilai Pancasila dalam Penegakkan HAM di Masyarakat

Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan anugerah dari Tuhan adalah kebebasan mendasar yang secara kodrati dimiliki oleh semua orang. Kebebasan-kebebasan tersebut antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak atas pengembangan diri, hak atas keadilan, hak atas kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak atas rasa aman, dan hak atas kesejahteraan tidak boleh diabaikan atau diambil oleh siapapun.

Suatu hak asasi manusia dilanggar atau dirampas harus dilindungi dan ditangani oleh negara. Hal ini dituangkan dalam Pasal 28 I Ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab melindungi, memajukan, menegakan, dan memenuhi hak asasi manusia. (UUD 1945).

Penegakkan hak asasi manusia sangat penting untuk pengembangan masyarakat yang beradab. Salah satu negara yang masih buruk dalam melindungi hak asasi manusia adalah Indonesia. Kebebasan ini mencakup hak untuk hidup, kehidupan berkeluarga, pengembangan pribadi, keadilan, kemandirian, dan komunikasi, serta hak keamanan dan kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dilanggar oleh siapa pun. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar hak asasi manusia harus menghadapi konsekuensi atas tindakannya.

Sebagai landasan dan titik tolak memberikan rumusan hak berdasarkan pada nilai-nilai pancasila sebagai berikut:

1. Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa: Pada sila pertama, hak asasi manusia dirumuskan sebagai kebebasan memilih agama, bebas dari paksaan, dan kebebasan berpendapat. Selain itu, hak asasi manusia mencakup sikap saling menghormati pandangan satu sama lain serta kemampuan menjalankan segala bentuk ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Hak asasi manusia yang terpenting bagi terciptanya tatanan umat beragama yang baik dan majunya kerukunan umat beragama adalah sikap saling toleran dan tidak memaksakan pandangan atau keyakinan satu sama lain.
2. Sila ke-2, Kemanusiaan yang adil dan beradab: hak asasi manusia menurut sila kedua adalah sikap kesadaran timbal balik terhadap persamaan diri sendiri serta hak dan kewajiban orang lain. Sikap yang tidak membedakan kelas sosial, gender, suku, ras, agama, atau kepercayaan akan muncul dari sikap saling menerima kesetaraan ini. Orang yang menganut pola pikir ini akan menghormati, mencintai,

dan menahan diri untuk tidak melecehkan satu sama lain. Pola pikir ini berpotensi meruntuhkan struktur dominan dalam interaksi sosial.

3. Sila ke-3, Persatuan Indonesia: Bangsa Indonesia mempunyai hak asasi manusia untuk mengutamakan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi sebagaimana tertuang dalam sila ketiga. Oleh karena itu, jika diperlukan, untuk masyarakat Indonesia akan rela menyerahkan apapun demi bangsa dan negara. Masyarakat Indonesia senantiasa berkenan menjadi orang Indonesia dan berupaya meningkatkan hubungan sosial demi kepentingan persatuan karena merupakan masyarakat yang menghargai tanah air dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Bhineka Tunggal Ika.
4. Sila ke-4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata dan perwakilan: Hak Asasi Manusia dalam sila keempat menyatakan bahwa seluruh anggota masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan tanggung jawab yang sama. Meski demikian, bangsa Indonesia harus memahami bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut, kepentingan negara dan masyarakat harus diutamakan. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan berusaha memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Memprioritaskan kepentingan bersama berarti masyarakat harus menghargai diskusi yang bijaksana dengan rasa tanggung jawab kekeluargaan ketika mengambil keputusan demi kebaikan yang lebih besar dan bertanggung jawab penuh atas hasil keputusan tersebut.
5. Sila ke-5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: hak asasi manusia pada sila kelima menyatakan bahwa masyarakat Indonesia hendaknya mencita-citakan perbuatan mulia yang mewujudkan nilai-nilai kekeluargaan, gotong-royong, dan menghormati orang lain. Mereka juga harus bertindak adil terhadap sesama masyarakat Indonesia dan orang lain, menghormati dan menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban, menunjukkan pola pikir yang sadar sosial, dan menahan diri dari sikap apa pun yang dapat dianggap diskriminatif, tidak dapat ditoleransi, eksploitatif, atau merugikan orang lain.

Salah satu isu terkini di Indonesia Timur adalah konflik sosial dan ketegangan di Papua terkait dengan tuntutan kemerdekaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan insiden kekerasan antara kelompok separatis dan aparat keamanan, yang mengakibatkan korban jiwa di kedua belah pihak serta penduduk sipil. Tindakan represif yang diambil oleh aparat keamanan dalam menghadapi demonstrasi dan perlawanan sering kali dikritik

oleh organisasi HAM, baik nasional maupun internasional, karena dianggap melanggar hak asasi manusia.

Selain itu, isu pembangunan dan kesejahteraan di Papua dan wilayah Indonesia Timur lainnya juga menjadi sorotan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Penduduk lokal sering merasa bahwa mereka belum sepenuhnya menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

Tantangan lingkungan juga menjadi perhatian, terutama terkait dengan eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kehidupan masyarakat adat. Penambangan, deforestasi, dan proyek-proyek besar lainnya sering menimbulkan konflik antara perusahaan dan komunitas lokal, yang merasa bahwa hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam tidak dihormati.

Dalam upaya menegakkan HAM dan mempertahankan nilai Pancasila, penting untuk menangani isu-isu ini dengan pendekatan yang inklusif, dialog yang konstruktif, serta menghormati hak-hak dasar dan martabat semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan urusan negara, termasuk politik, pemerintahan, kesusilaan, hukum, dan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia negara harus dijiwai dengan cita-cita Pancasila, dan kita harus siap membela hak-hak kita sebagai makhluk sosial. Selain itu, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain, kita juga harus bisa menghormati dan membela hak asasi orang lain. Selain itu, jangan izinkan siapa pun melanggar atau menginjak injak hak asasi manusia kita. Pemerintah dan organisasi-organisasi yang bertugas menegakkan hak asasi manusia juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa menegakkan HAM dan nilai-nilai hak asasi manusia di era Gen Z di Indonesia yang berlandaskan Pancasila memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hak asasi manusia dan nilai-nilainya dijunjung tinggi oleh ideologi Pancasila yang menjadi landasan falsafah negara. Wawasan Pancasila mencakup konsep-konsep dasar hak asasi manusia yang meliputi cita-cita keadilan, persatuan, ketuhanan, kemanusiaan, dan kemanusiaan. Sesuai nilai-nilai Pancasila, untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan di Indonesia, setiap lapisan masyarakat harus mampu menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Mengingat keberagaman Indonesia dari segi ras, budaya, agama, warna kulit, dan kedudukan sosial, maka nilai-nilai kemanusiaan harus dipraktikkan untuk mencegah perpecahan di antara warga negaranya. Pentingnya

menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia juga ditekankan, dengan melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penghormatan terhadap martabat manusia. Karena para Gen Z ini juga butuh bimbingan dari mereka yang lebih mengerti mengenai HAM dan Pancasila. Meskipun Gen Z berada di tengah-tengah canggihnya teknologi, jika mereka salah memilih panutan mereka maka akan berdampak pada masa depan sebuah bangsa. Apabila Gen Z dapat menguasai teknologi, bisa saja mereka memberantas tindak pelanggaran HAM di Indonesia. Dengan cara membuat E-Poster, Komik, atau bahkan video-video edukasi lainnya yang dapat membangkitkan semangat seluruh masyarakat untuk menegakkan HAM dan Nilai-nilai Pancasila di kehidupan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Generasi Z: Memahami Karakter Generasi Baru yang Akan Mengubah Dunia Kerja
<https://g.co/kgs/HgZ75CN>
- Generasi Z: Memahami Karakter Generasi Baru yang Akan Mengubah Dunia Kerja
<https://g.co/kgs/HgZ75CN> David Stillman dan Jonah Stillman
- Sepranadja. (2019). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA DALAM
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. In Jurnal Pendidikan
Kewarganegaraan (Vol. 2, Issue 2).
- Undang-undang Dasar NKRI, 1945
- Emilia Susanti, 2020. Pancasila. Kubang : CV Cahaya Firdaus